

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitrah, *Modus, 2014, Operandi Pidana Khusus Diluar Dari KUHP Korupsi Money Laundering & Traffiking*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, Tatiana Siska Wardan, M.Farm, 2021, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Junaidi, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, 2023, Cendikia Mulia Mandiri, Kota Batam.
- Mudzzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Roni Wijayanto, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University, Surakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang.

B. Jurnal, Artikel, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya

Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, Hartiwiningsi, 2025, Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII No. 1.

Arief S. Sadeli, 2020, Aspek-Aspek Hukum dalam Penelitian Empiris dan Normatif, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10 No. 2.

Ayu Nur Nadiyah, 2024, *Tinjauan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Berdasarkan Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu It)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.

Ardi Bonatua, 2024, Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Berdasarkan Pasal 263 KUHP, *Skripsi*, Universitas Jayabaya.

Abdurrahkman Alhakim, Winda Fitri, Alexandra Renanda Sareng, 2025, Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan hukum islam dalam Rangka Pembaruan Hukum, *Jurnal Suspremasi*, Vol. 15. No.1.

Benaya Hendriawan, 2025, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 1.

Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A. T., Mokorimban, Ronny Sepang, 2022, “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. *Lex Crimen*, Vol.11 No. 3.

Danang Sucahyo, Purwoto, Sularto, 2013, *Disparasitas Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Diponegoro Law Review. Vol. 1, No. 2.

Gladys Natalie, Benny Djaja, 2023, Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Unes Law Riview*. Vol. 5. No. 1.

Hamdiyah, 2024, Analisis Unsur-Unsur tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiqat*. Vol. 18. No. 1.

I Ketut Seregig, Ansori Ansori, Febri Anggraini, 2022, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan, *Journal Of Crimina*, Vol. 3 No. 1.

I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati, 2024, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan

Surat, “*Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No.2.

Jimly Asshiddieqie, 2025, “Dinamika Pratik Hukum Tata Negara Indonesia di Era Disrupsi, “Presentasi dalam Seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Lintang Cahyani Andira, Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. *Tesis*, Universitas Jember.

M.Idham Teguh Budiman, Yusuf Hidayat, Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2025, Tinjauan Hukum Penolakan Klaim Asuransi Dengan Perdebatan Status Wabah Penyakit Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. Vol. 11. No. 1.

Noverianus, 2025, “Kejahatan Pemalsuan Dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Clavia Jurnal of law*. Vol. 23 No. 1.

Nur Aripkah dan Khairunnisa Noor Asufie, 2024, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia, *Notary Law Journal*. Vol 3. No. 1.

Nur Laila Yuflikhati, Rindiyan, Aulia Zaki, Neni Susilowatia, Anggita Harsya Fahrezy, 2025, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol: 5. No 1.

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, “Disparatis Dalam Penjatuhan Pidana” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47. No. 3.

Novi Oktarina Zalzabila, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Untuk Klaim Asuransi, Makasar, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Novi Oktarina Zalzabila, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian untuk Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi, Dwi Elok Indriastuti, 2024, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 2. No. 1.

Raquel Nabila Azka Siregar dan Satino Satino, 2024, Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Klaim Asuransi di Indonesia: Perspektif Kontraktual dan Implikasinya, *Jurnal USM Law Riview*. Vol. 7. No. 3.

Rizky Adi Saputra, 2023, "Telaah Yuridis Tentang Pengertian dan Fungsi Akta Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 14. No. 2.

Tofik Yanuar Chandra dan Hajairin, 2024, Menakar Daluwarsa: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Vience Ratna Multiwijaya, 2018, Perlindungan dan Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja, Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, vol. 1. No. 1.

Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, 2018, Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol .34. No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

D. Peraturan Pelaksana dan Lembaga Teknis

Danpala, 25 Agustus 2025, Direktorat Jendral Badan Hukum Mahkamah Agung R.I.

Muhammad Iqbal Iskandar, 2025, "Penafsiran Masa Daluwarsa Pemalsuan Surat Berdasarkan Putusan MK.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj.

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.

Pandora dan Alodia. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Delik Aduan Turut Serta Melakukan Zinah Yang Telah Kedaluwarsa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017). *Verstek*, 9(1). 55-62.

E. Internet

Firda Syariyah, Kearsipan : Dampak Kemajuan teknologi terhadap Dunia Kearsipan, <https://www.kompasiana.com/radenriskidwikoestanto0566/64b744674addee31420e9c02/kearsipandampak-kemajuan-teknologi-terhad>

ap dunia kerarsipan,%25Akses%25tanggal%205%25Agustus%2025.

Soerjono Soekanto Dominggun Silaban, Pola Pemidanaan Suatu Tindak Pidana,
<http://www.dominggusilaban.blogspot.com>

[https://dandapala.com/article/detail/indonesia-pernah-ubah-irah-irah-putusan-inisejarahny#:~:text=Indonesia%20memiliki%20UndangUndang%20Nomor%2019%20Tahun%201948\](https://dandapala.com/article/detail/indonesia-pernah-ubah-irah-irah-putusan-inisejarahny#:~:text=Indonesia%20memiliki%20UndangUndang%20Nomor%2019%20Tahun%201948)